

## **BAB III**

### **PERAN PBB DALAM PROSES PENYELESAIAN KONFLIK**

#### **A. Keterlibatan PBB dalam Konflik Internal**

##### **A.1. Pengaruh PBB sebagai Organisasi Internasional**

Salah satu tujuan utama PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) adalah mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Sejak berdiri, PBB telah sering diminta untuk mencegah pertikaian agar tidak meningkat menjadi peperangan, untuk membujuk pihak-pihak supaya menggunakan meja konferensi dan bukannya kekuatan persenjataan, atau untuk membantu memulihkan kembali perdamaian ketika konflik meletus. Selama puluhan tahun PBB telah membantu mengakhiri sejumlah konflik, sering melalui tindakan Dewan Keamanan (organ utama dalam menanggulangi masalah-masalah perdamaian dan keamanan internasional).

Selama 1990-an, telah terjadi perubahan-perubahan besar dalam pola konflik dan dalam cara bagaimana komunitas internasional memberikan tanggapan terhadap konflik. Salah satu penyebabnya adalah bahwa lebih dari 90 persen dari konflik belakangan ini berlangsung di dalam negara dan bukannya antar negara.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, PBB telah membentuk kembali dan meningkatkan jangkauan perannya yang berada di bawah komandonya, dengan memberikan tekanan pada pencegahan konflik. Secara terus-menerus, PBB mengadaptasi operasi-operasi pengawasan perdamaian untuk menjawab tantangan-tantangan baru. Dalam usahanya ini, PBB juga banyak melibatkan organisasi-organisasi regional dan memperkuat pembangunan perdamaian pasca-konflik. Konflik-konflik sipil telah memunculkan masalah yang kompleks dalam kaitannya dengan respon komunitas internasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, *Basic Facts about United Nations*; United Nations Information Centre, 1995, hal 74.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Dalam membangun perdamaian dan keamanan dunia, organ-organ PBB seperti Dewan Keamanan (DK), Majelis Umum (MU) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen), sama-sama memainkan peran penting.

DK PBB adalah organ utama PBB yang mempunyai tanggung jawab utama untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan. Berdasarkan Piagam PBB, negara-negara anggota diwajibkan untuk menyelesaikan pertikaian mereka dengan cara damai, sehingga tidak mengancam perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan. Mereka harus menahan diri untuk tidak mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap negara mana pun, dan akan menyerahkan pertikaian apa pun kepada DK PBB.

## **A.2. Perkembangan Peran Peacekeeping PBB**

Setelah Perang Dunia II berakhir, dunia dibagi dalam dua kekuatan baru yaitu Timur dan Barat. Perkembangan kekuatan Uni Soviet sebagai blok komunis di Eropa Timur telah berkembang dan mengakhiri kerjasama kekuatan-kekuatan besar yang ada sebelumnya. Pada masa Perang Dingin, peningkatan bahaya yang mengancam manusia sebagai hasil dari peningkatan teknologi nuklir yang pesat dan berbagai senjata pemusnah massal (*weapons of mass destruction / WMD*), dikombinasikan dengan peningkatan hubungan antagonis antara kedua negara adidaya yang memiliki nuklir, membutuhkan upaya-upaya yang lebih besar dalam mencari solusi-solusi yang damai untuk menghadapi konflik dan upaya kerjasama yang lebih besar pada tingkat internasional.

*Peacekeeping* muncul pada masa Perang Dingin sebagai bentuk peranan PBB yang berupaya untuk memenuhi tujuan utamanya dalam menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Tujuan utama PBB dalam Piagam PBB bab I pasal I, adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dalam upaya memenuhi tujuan ini, berbagai bab dan pasal dalam Piagam PBB membentuk berbagai prosedur dan organ dalam sistem PBB. Dalam Piagam PBB Pasal 24 kemudian mengembankan kewajiban terhadap tujuan ini kepada Dewan Keamanan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Lihat Piagam PBB, Bab II, Pasal 24

*Peacekeeping* sendiri tidak tercantum dalam Piagam PBB. *Peacekeeping* diadopsi pada masa Perang Dingin sebagai alat utama untuk mencegah dua superpower pada masa itu dari upaya-upaya lokalisasi konflik.<sup>4</sup> Prinsip kedaulatan negara dan *non-interference* dalam urusan negara lain yang ada pada masa ini secara keras melarang PBB untuk melakukan intervensi perang antar negara.<sup>5</sup> *Peacekeeping* pada masa Perang Dingin turut melibatkan berbagai personil militer dari berbagai negara, dibawah komando PBB, untuk membantu mengontrol dan menjaga perdamaian antara negara-negara yang bertikai dalam mendukung terciptanya perjanjian perdamaian dan gencatan senjata.

Misi *peacekeeping* dikerahkan segera setelah Perang Dunia II berakhir dalam upaya memenuhi mandat PBB untuk menjamin perdamaian dan keamanan internasional. Sampai saat ini ada beberapa misi dari masa ini yang masih beroperasi. Cikal bakal *peacekeeping* sudah tampak pada tahun 1947, ketika sebuah komite khusus PBB (*United Nations Special Committee on the Balkans*) didirikan untuk merespon perang sipil yang terjadi di Yunani.<sup>6</sup> Namun demikian, misi PBB pertama yang secara eksplisit menggunakan istilah *peacekeeping* adalah *UN Emergency Force* (UNEF I) di tahun 1956. Misi ini dikirim ke Sinai dalam kaitannya dengan krisis Suez 1956, untuk mengobservasi gencatan senjata dan penarikan mundur pasukan Inggris, Perancis dan Israel dari wilayah Mesir. Sebagai operasi *peacekeeping* PBB yang pertama, UNEF I merupakan misi yang penting sebagai contoh bagi misi-misi PBB yang lainnya. Misi ini kemudian menjadi sebuah uji kasus bagi nilai dimana pasukan bersenjata dan netral dapat berperan dalam membatasi konflik.

Misi ini berhasil dalam memenuhi mandatnya dan dari situ kemudian membentuk prinsip dasar, yang sejak saat itu menjadi *guidelines* yang penting untuk misi-misi kedepannya. Prinsip dasar *peacekeeping* ini diperkenalkan oleh Sekjen PBB saat itu, Dag Hammarskjold dan Presiden Sidang Umum, Lester Pearson dengan karakteristik sebagai berikut:<sup>7</sup> (i) atas persetujuan dan kerjasama pihak yang bertikai untuk pelaksanaan misi, dukungan internasional,

---

<sup>4</sup> Stephen M. Hill and Shanin P. Malik, *Peacekeeping and the United Nations* (Aldershot: Dartmouth Publishing Company Limited, 1996), hal 14.

<sup>5</sup> Lihat Piagam PBB, Bab I, Pasal 2, Ayat 7.

<sup>6</sup> *Peacekeeping – Evolution*, <http://www.sais-ihu.edu/CMtoolkit/index.php?name=pk-evolution#First%20Generation>, diakses pada 9 April 2008, pk 23.12

<sup>7</sup> Ramesh Thakur at all, *Op.Cit.*, hal 10.

khususnya dalam dewan keamanan PBB; (ii) tidak menggunakan kekuatan kecuali untuk bela diri; (iii) kontribusi sukarela untuk berpartisipasi dalam pasukan (multinational composition); netralitas (ketidakberpihakan); (iv) berada di bawah kontrol dan perintah PBB.

Operasi *peacekeeping/Peacekeeping Operations*(PKO) PBB selama Perang Dingin pada umumnya disebut sebagai *traditional peacekeeping*. *Traditional peacekeeping* terdiri dari tugas pengamatan (*observations*) yang banyak dilakukan pada awal-awal *peacekeeping* dan juga penempatan PKO di daerah penyangga (*buffer zone*). Selama masa Perang Dingin, *peacekeeping* PBB telah mengalami dinamika yang memperlihatkan proses terbentuknya karakteristik-karakteristik khusus pelaksanaan *traditional* PKO, yang menjadi prinsip-prinsip dasar PKO dan berpengaruh pada pelaksanaan *peacekeeping* masa sekarang. Karakteristik-karakteristik PKO yang dapat dilihat selama Perang Dingin terdiri dari 5 bagian, yaitu: izin dari pihak yang bertikai, netralitas, dukungan dari Dewan Keamanan (DK) serta mandat yang jelas, partisipasi dari negara anggota, dan tidak menggunakan kekuatan kecuali sebagai pilihan terakhir dan untuk membela diri.<sup>8</sup>

Pasca perang Dingin, muncul kecenderungan konflik yang berdimensi konflik internal (*intra-state conflict*) sehingga tidak ada batas yang jelas untuk menurunkan pasukan seperti yang terjadi pada konflik antar negara. Melihat hal ini maka tugas dan peran PKO PBB pun juga mengalami pergeseran dari tugas untuk memelihara perdamaian menjadi operasi yang memiliki sejumlah dimensi kegiatan dalam mengatasi konflik internal suatu negara. Peran baru PKO PBB ini tidak hanya memiliki dimensi militer sebagaimana halnya generasi pertama (*traditional peacekeeping*), tetapi juga memiliki dimensi politik, ekonomi, sosial dan kemanusiaan.<sup>9</sup> Tugas PKO pada masa multidimensional *peacekeeping* juga mencakup bantuan dalam rangka pemilihan umum, pelatihan bagi kepolisian setempat, perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM), dan pembersihan ranjau darat.<sup>10</sup> Operasi-operasi semacam ini juga mengikutsertakan dukungan komponen sipil dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam pemberian bantuan kemanusiaan, penyusunan dan perlindungan dalam pemilihan umum,

---

<sup>8</sup> Stephen M.Hill dan Shanin P.Malik, *Peacekeeping and the United Nations*, Aldershot: Dartmouth Publishing Company Limited, 1996.

<sup>9</sup> Michael E.Brown, *The International Dimension of Internal Conflict*, *Op.Cit.*, hal 1.

<sup>10</sup> *Ibid.*

pengaturan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelucutan senjata serta rehabilitasi para pengungsi. Tugas-tugas semacam ini sebenarnya juga terdapat dalam traditional peacekeeping, namun dalam jumlah yang sangat kecil dan bukan merupakan bagian penting dalam operasi.

PKO yang berkembang pasca Perang Dingin ini tidak lagi hanya berperan dalam fungsi peacekeeping saja, tetapi sudah melibatkan kegiatan-kegiatan *peace-building* dan *peace-enforcement*, sebagai akibat dari perubahan karakteristik keamanan yang terjadi Pasca Perang Dingin dan adanya perubahan hubungan antara dua kekuatan besar dalam tubuh Dewan Keamanan PBB (AS dan Rusia), sehingga peacekeeping PBB dapat dikatakan sudah berkembang dalam operasi perdamaian yang lebih kompleks, multifungsi dan juga multidimensi.

## **B. Peran Multi Dimensi PKO PBB dalam Konflik Sierra Leone**

### **B.1. Peran Diplomasi dan Mediasi**

Strategi penting untuk mencegah pertikaian supaya tidak memuncak menjadi konflik, dan untuk mencegah berulangnya konflik adalah diplomasi pencegahan dan pelucutan senjata preventif. Diplomasi pencegahan adalah tindakan untuk mencegah jangan sampai timbul pertikaian, menyelesaikannya sebelum memuncak menjadi konflik atau membatasi perluasan konflik kalau dia muncul. Upaya ini bisa berbentuk mediasi, konsiliasi, atau negosiasi. Peringatan dini merupakan komponen paling penting dari upaya pencegahan dan PBB dengan hati-hati memantau perkembangan politik dan lain-lain di dunia, untuk mendeteksi ancaman-ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, untuk lebih memberdayakan DK dan Sekjen untuk melaksanakan tindakan pencegahan.<sup>11</sup> Sedangkan pelucutan senjata preventif merupakan tujuan PBB agar dapat mengurangi dan akhirnya menghapus senjata kimia dan memperkuat pelarangan terhadap senjata biologis karena senjata-senjata ini merupakan ancaman paling besar terhadap umat manusia.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> \_\_\_\_\_, *Basic Facts about United Nations*, *Op.Cit*, hal 77.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 121.

Utusan dan wakil-wakil khusus Sekjen terlibat dalam mediasi dan diplomasi pencegahan di seluruh dunia. Untuk beberapa tempat yang panas (konflik sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama), hanya dengan kehadiran Utusan Khusus Sekjen yang terampil sudah bisa mencegah meningkatnya ketegangan. Tugas ini acapkali dilaksanakan dengan kerjasama erat dengan organisasi regional.<sup>13</sup>

Keterlibatan PBB dalam mengatasi konflik internal di Sierra Leone dimulai pada bulan November 1994. Diawali dengan permohonan dari Presiden Sierra Leone melalui surat kepada Sekjen PBB, untuk membantu memfasilitasi negosiasi antara pemerintahan Sierra Leone dengan RUF. Pada bulan Desember 1994, PBB kemudian mengadakan misi eksploratif untuk menganalisis konflik tersebut.

Berdasarkan laporan dari tim misi eksploratif tersebut, dapat dikatakan bahwa negara tersebut mengalami banyak kerusakan dalam berbagai hal sebagai akibat dari konflik yang sudah berjalan selama tiga tahun.<sup>14</sup> Baik secara politik, ekonomi, sosial, moral dan struktural, Sierra Leone telah mengalami suatu kemunduran. Salah satu faktor yang merupakan pemicu konflik tersebut adalah berlian. Hal ini terbukti pada tindakan yang dilakukan baik oleh RUF dan tentara pemerintah, dimana berlian telah membantu RUF dalam hal membiayai tindakan kekerasan yang dilakukan mereka. RUF menggunakan berlian untuk membeli persenjataan, baik dari tentara pemerintah, maupun dari luar negeri.<sup>15</sup> Selain itu faktor pemerintahan yang lemah dan buruk juga memperparah keadaan di Sierra Leone dimana pemerintahan yang ada selama ini tidak dapat menjalankan pemerintahan yang baik sehingga akibatnya Sierra Leone menjadi *collapse* dan lemah terhadap berbagai serangan pemberontakan yang berlarut-larut.<sup>16</sup> (Lihat Bab II)

Berdasarkan data-data tersebut, PBB kemudian menunjuk utusan khusus dari Ethiopia, Berhanu Dinka, untuk menegosiasikan perjanjian yang mengutamakan dikembalikannya asas pemerintahan di tangan rakyat. Hal tersebut dilakukan karena selama ini rakyat tidak mendapat perlakuan yang adil

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 77.

<sup>14</sup> UNOMSIL – Background pada <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unomsil/UnomsilB.htm>, diakses pada 15 Maret 2008, pk 21.55.

<sup>15</sup> Amanda Bryant Banat, *Op.Cit.*

<sup>16</sup> William Reno, *Op.Cit.*

dan tidak dapat menentukan nasibnya sendiri, yang diakibatkan oleh pemerintahan yang bersifat otoriter selama ini.

Dalam hal ini PBB, bekerjasama dengan OAU (*Organization of African Unity*) dan ECOWAS (*Economic Community of West African States*), dengan diwakili utusannya masing-masing, melakukan mediasi dan perundingan untuk mencari penyelesaian dan mengembalikan kekuasaan sipil. Kerjasama ini dilakukan karena OAU dan ECOWAS merupakan organisasi regional di Afrika. DK PBB dapat memberikan pengesahan operasi perdamaian kepada organisasi regional, karena organisasi regional memiliki peran yang penting dalam operasi perdamaian mengingat kedekatan wilayah dengan daerah konflik, organisasi regional memiliki kekhawatiran yang besar terhadap situasi yang terjadi dan akan berusaha untuk mencegah penyebaran konflik yang dapat membahayakan keseluruhan kawasan. Adanya kesamaan budaya, tradisi, geografi dan terkadang persamaan sejarah, agama dan kesamaan persenjataan dan pelatihan militer, yang dimiliki oleh organisasi regional, memberikan pengetahuan dan analisa yang lebih mendalam mengenai akar permasalahan, sehingga hal-hal ini juga menjadi faktor penting dalam mengatasi dan menghentikan konflik.<sup>17</sup>

Hasil dari proses perundingan tersebut terlihat dengan diadakannya Pemilu Sierra Leone pada Februari 1996, dengan kesepakatan kelompok tentara (dibawah pimpinan Brigadir Jenderal Julius Maada Bio) melepaskan kekuasaan pada pemenang pemilu tersebut, yaitu Ahmad Tejan Kabbah. Namun demikian, RUF tidak menyetujui atas hasil pemilu tersebut, karena kekuasaan di negara ini telah diambil oleh pemerintah sipil, sehingga konflik pun kembali terjadi.<sup>18</sup>

Pada bulan November 1996, Berhanu Dinka kembali melakukan negosiasi perjanjian perdamaian antara RUF (dibawah pimpinan Foday Sankoh) dan pemerintahan Sierra Leone, yang kemudian dikenal dengan *Abidjan Accord*/ Perjanjian Damai Abidjan, yang isinya antara lain; menetapkan pembentukan pasukan penjaga perdamaian yang netral dan penarikan semua pasukan asing

---

<sup>17</sup> Professor Du Nongyi, A Perspective of Coordination Between The United Nations and Regional Organizations in Peace Operations, dalam *Perception: Journal of International Affairs*, December 2003-February 2004, Volume VIII, No.4, hal.71-72.

<sup>18</sup> UNOMSIL – Background , *Loc.Cit.*

dari Sierra Leone.<sup>19</sup> Akan tetapi, perjanjian tersebut pun gagal terlaksana, karena setelah itu muncul gerakan militer dari RUF yang didukung dengan bergabungnya Mayor Jenderal Paul Karoma, yang merupakan pemimpin dari tentara Sierra Leone/Sierra Leone Army (SLA), yang kemudian membentuk pemerintahan Junta Militer, sehingga menyebabkan Presiden Kabbah dan seluruh staf pemerintahannya melarikan diri ke Guinea. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak berlaku dan tidak dapat ditegakkan lagi di Sierra Leone.

Melihat hal tersebut, pada tanggal 8 Oktober 1997, DK PBB kemudian mengeluarkan Resolusi 1132 yang isinya antara lain; memberlakukan sanksi terhadap junta AFRC, melarang segala bentuk impor terhadap perlengkapan militer dan minyak ke dalam Sierra Leone, serta menghimbau semua negara anggota untuk menyediakan bantuan teknis dan logistik dalam rangka mendukung dan membantu ECOWAS untuk menyelesaikan tanggungjawabnya pada implementasi dari resolusi ini. Selain itu dalam resolusi ini PBB juga memberikan wewenang kepada ECOWAS untuk menjamin pelaksanaan embargo, dengan menggunakan pasukan ECOMOG (*The Economic Community of West African States Monitoring Group*).<sup>20</sup>

## **B.2. Peran Pasukan Perdamaian PBB**

Melengkapi diplomasi pencegahan, peran PBB yang lain pada konflik internal di Sierra Leone adalah peran operasi perdamaian melalui penempatan preventif dan pelucutan senjata preventif. Penempatan preventif/penempatan para pengawas perdamaian di lapangan dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik yang dimaksudkan untuk menarik "garis biru yang tipis" (*Thin Blue Line*), guna membantu menahan jangan sampai terjadi konflik dan membangun rasa saling percaya. *Thin Blue Line* sendiri ditujukan kepada penempatan pasukan pengawas perdamaian, yang dikenal dengan sebutan "*the blue helmet*", secara merata di daerah konflik tersebut. Pelucutan senjata preventif berusaha untuk mengurangi jumlah senjata ringan di wilayah-

---

<sup>19</sup> A. Adebajo, *Op.Cit.*

<sup>20</sup> Resolusi PBB 1132 dalam

<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/267/13/PDF/N9726713.pdf?OpenElement>, diakses pada 15 Maret 2008, pk 20.35.

wilayah konflik. Di El Salvador, Mozambique dan di tempat-tempat lain, upaya ini menghasilkan demobilisasi kekuatan-kekuatan bersenjata dan pengumpulan serta penghancuran senjata mereka yang terlibat sebagai bagian menyeluruh dari perjanjian damai. Menghancurkan senjata-senjata kemarin akan mencegah pemanfaatannya dalam peperangan di kemudian hari.

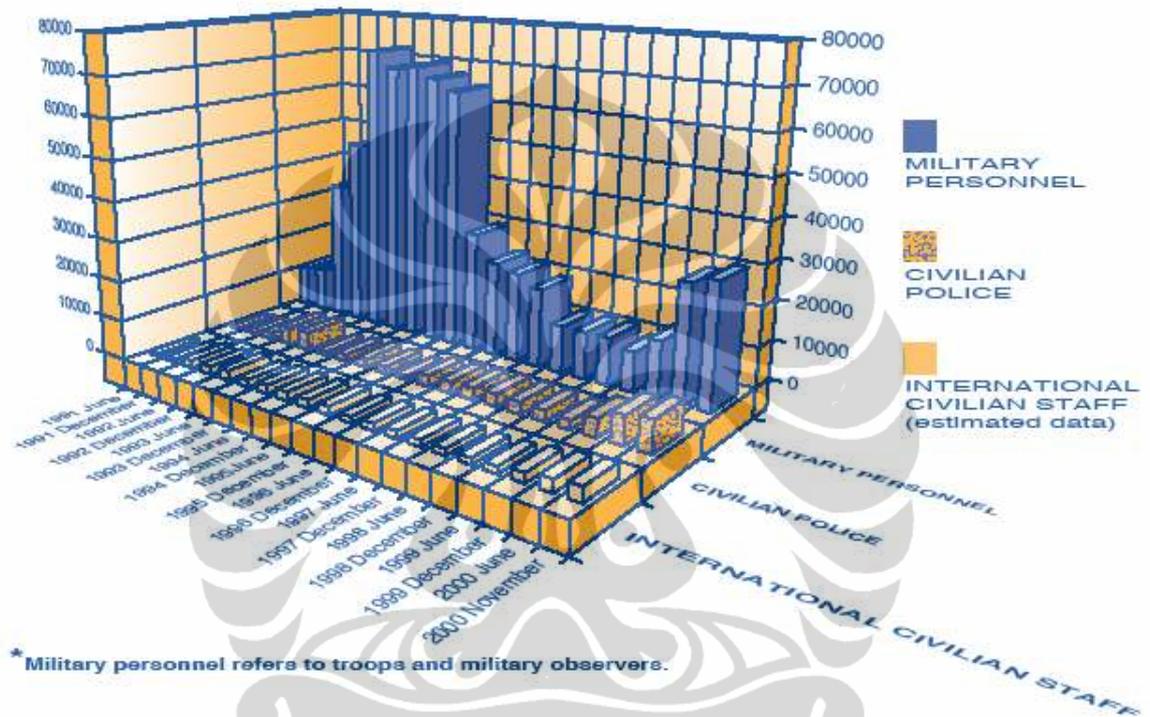
Operasi pengawasan perdamaian PBB merupakan instrumen paling penting yang dimanfaatkan oleh komunitas internasional untuk memajukan perdamaian dan keamanan internasional. Peran operasi perdamaian diakui secara internasional pada tahun 1988, ketika pasukan-pasukan pengawas perdamaian PBB menerima hadiah Nobel Perdamaian.



### Bagan III. 1. Komposisi Pasukan Operasi Perdamaian (1991-2000)

## Composition of peacekeeping staff

Total number of military personnel,\* civilian police and international civilian personnel in peacekeeping operations from 1991 to 2000



Sumber: <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/pub/pdf/2.pdf>, diakses pada 21 Januari 2008, pk.19.50.

Operasi pengawasan perdamaian dan penempatannya memperoleh wewenang dari DK PBB, dengan persetujuan pemerintah tuan rumah dan biasanya dengan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Operasi ini bisa mencakup personel militer dan polisi, bersama-sama dengan staff sipil. Operasi bisa melibatkan misi pengamat militer, pasukan pengawas perdamaian atau kombinasi dari keduanya. Misi pengamat militer terdiri dari perwira-perwira tak bersenjata, yang secara khusus memantau pelaksanaan kesepakatan atau gencatan senjata. Prajurit pasukan pengawas perdamaian dalam operasinya

memang membawa persenjataan, tetapi dalam banyak kasus hanya dapat menggunakannya untuk membela diri.<sup>21</sup>

Personel militer operasi pengawasan perdamaian disumbangkan secara sukarela oleh negara-negara anggota dan memperoleh dana dari masyarakat internasional. Negara-negara yang berpartisipasi memperoleh kompensasi dengan tingkat yang standar dari anggaran khusus pengawasan perdamaian.<sup>22</sup>

Terlibatnya negara-negara yang berkontribusi tersebut, berkaitan dengan peran operasi perdamaian PBB pasca Perang Dingin yang merupakan operasi perdamaian yang multifungsi dan multidimensional. Sesuai dengan fungsi dan peran yang multidimensional, PBB memiliki komponen-komponen yang beragam, mulai dari politik, militer, polisi sipil dan kemanusiaan. Dalam operasi *peacekeeping*, PBB melibatkan komponen militer yang terdiri dari *peacekeeping forces* (blue helmet), pemantau militer, petugas sipil dan dibantu oleh staf-staf lokal dan internasional. *Peacekeeping forces* merupakan pasukan multinasional yang berasal dari negara-negara anggota. Pemantau militer dan petugas polisi sipil berasal dari negara anggota yang ditugaskan dan dipekerjakan di bawah PBB. Sementara pasukan militer merupakan kontingen nasional dari negara masing-masing, yang kemudian melaporkan permasalahan operasional kepada Kepala Pasukan / *Force Commander* operasi perdamaian dan diteruskan ke Utusan Khusus Sekjen PBB.

Operasi-operasi pengawasan perdamaian tahun 2000 diperkirakan mencapai \$2 milyar, atau sekitar 0,5 persen dari pengeluaran keperluan militer di seluruh dunia. Operasi pengawasan perdamaian memperoleh dana dari anggaran pengawasan perdamaian. Sedangkan pasukannya disumbangkan oleh banyak negara. "Memikul beban secara bersama" ini bisa menjadi contoh efisiensi manusia, keuangan dan dalam pengertian politik. Sejak 1948, lebih dari 750.000 personel militer, kepolisian maupun personil sipil dari sekitar 110 negara telah bertugas dalam operasi perdamaian, dan terdapat lebih dari 1.650 yang meninggal.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> \_\_\_\_\_, *Pengetahuan dasar mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa, Op.Cit.*, hal.81.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal.82.

Karena sifat universalitasnya, operasi-operasi PBB menawarkan keuntungan yang unik sebagai satu sarana dalam menanggulangi konflik. Universalitas tersebut menjadi unsur tambahan pada legitimasi operasi tersebut. Sementara itu kedaulatan negara tuan rumah menjadi terbatas. Pengawas perdamaian dari luar pihak-pihak yang berseteru untuk berdiskusi, sementara memusatkan perhatian global pada keprihatinan lokal.<sup>24</sup>

Prasyarat-prasyarat tertentu bagi keberhasilan operasi menjadi semakin jelas, apabila adanya keinginan yang murni dari mereka yang bermusuhan untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka secara damai; adanya mandat yang jelas, dukungan politik yang kuat dari masyarakat internasional dan disediakannya sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan operasi.<sup>25</sup>

Beberapa karakteristik Operasi Perdamaian/*Peace Keeping Operations* PBB antara lain, adalah:

1. Merupakan pasukan multinasional dan tidak memiliki kekuatan memaksa.
2. Di dalamnya, Dewan Keamanan / DK PBB melakukan identifikasi pihak yang “salah”, mengancam perdamaian atau melakukan agresi.
3. Menggunakan kekuatan militer tapi tidak memihak kepada pihak manapun dan bertindak sebagai penengah antara pihak yang bersengketa untuk mencapai dan memulihkan perdamaian.
4. Kehadirannya dalam suatu sengketa, berdasarkan pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Operasi bisa mengambil bentuk yang bermacam-macam, dan secara terus-menerus bergerak sesuai dengan perubahan keadaan. Tugas-tugas yang dipikul oleh pasukan operasi perdamaian, antara lain adalah:<sup>26</sup>

- *Mempertahankan gencatan senjata dan pemisahan pasukan.* Dengan menyediakan “ruang bernafas”, satu operasi yang didasarkan pada satu perjanjian terbatas diantara pihak-pihak yang bertikai, bisa membina suasana yang kondusif untuk perundingan.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

- *Penempatan pencegahan.* Penempatan yang dilakukan sebelum meledaknya konflik, dapat memberikan jaminan adanya kehadiran dan tingkat keterbukaan yang berfaedah untuk kemajuan politik.
- *Perlindungan terhadap operasi kemanusiaan.* Dalam banyak konflik, penduduk sipil secara sengaja dijadikan sasaran sebagai satu cara untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Dalam situasi seperti itu, para pengawas perdamaian diminta untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi operasi kemanusiaan
- *Pelaksanaan penyelesaian perdamaian komprehensif.* Operasi-operasi yang kompleks, multi-dimensional, yang ditempatkan berdasarkan perjanjian-perjanjian damai yang komprehensif, bisa membantu dalam tugas yang beragam, seperti memberikan bantuan kemanusiaan, memantau hak-hak asasi manusia, mengamati pemilihan umum dan mengkoordinasikan dukungan untuk rekonstruksi perekonomian.

Operasi pengawasan perdamaian PBB merupakan salah satu mekanisme untuk memelihara perdamaian internasional yang diwujudkan dalam misi Pengamat (*Observers*) dan Pasukan Pemelihara Perdamaian (*United Nations Peace Keeping Force*). Kedua pasukan ini menggunakan kekuatan militer dari berbagai Negara yang ditetapkan oleh DK PBB. Komando tertinggi Operasi Pemeliharaan Perdamaian ini dipegang oleh Sekjen PBB, sedangkan komando di lapangan dipilih oleh Sekjen PBB setelah berkonsultasi dengan DK PBB.

Keabsahan pelaksanaan *Peace Keeping Operation* (PKO) yang berdasarkan pada Bab VII Piagam PBB juga harus dijadikan dasar bagi penggunaan kekuatan militer dalam pelaksanaan misi tersebut.<sup>27</sup> Operasi dengan kekuatan militer yang didasarkan pada Bab VII Piagam PBB tersebut tidak hanya digelar untuk mengatasi konflik bersenjata di suatu negara, tetapi telah berkembang sebagai mekanisme untuk melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan di suatu wilayah. Atas dasar kemanusiaan, PBB kini juga melakukan intervensi melalui PKO untuk melindungi penduduk sipil, pengungsi dan *internally displaced persons*, serta perlindungan hak-hak asasi manusia dan

---

<sup>27</sup> Simon Chesterman, *Just War or Just Peace? : Humanitarian Intervention and International Law* (New York:Oxford University Press, 2001), hal.112.

juga perlindungan pengiriman bantuan kemanusiaan.<sup>28</sup> Selain itu untuk mengatasi krisis kemanusiaan, PBB melalui Dewan Keamanannya juga mengeluarkan berbagai resolusi.

William D. Jurch, dalam "*UN Peace Operations and the Brahimi Report*" tahun 2001, menggambarkan rentangan mandat yang diemban oleh pasukan operasi perdamaian PBB, mulai dari mandat yang sederhana sampai dengan yang sulit. Hal ini dapat terlihat dari tugas-tugas pasukan operasi perdamaian yang sangat bervariasi, mulai dari *preventive deployment*, pengawasan gencatan senjata, kontrol senjata, demobilisasi dan reintegrasi, bantuan/pengembalian pengungsi, rekonstruksi pasca-konflik, bantuan terhadap kegiatan sipil lainnya, *good offices*, pengawasan/ pengesahan pemilu, pengawasan hak asasi manusia, pengawasan/pelaksanaan pemilu, pelatihan dan pengawasan polisi dan badan hukum, pengawasan administrasi sipil, *executive policing* dan *judicial responsibility*, perlindungan terhadap bantuan kemanusiaan, melindungi korban sipil, menjaga kondisi agar tetap aman, tugas administrasi sipil, menciptakan kondisi yang aman dan kontrol senjata secara paksa.<sup>29</sup>

Dalam kaitannya dengan konflik internal Sierra Leone, operasi perdamaian yang dilakukan oleh PBB dapat dikatakan telah meliputi dan mencakup tugas-tugas dan mandat-mandat mulai dari yang sederhana (seperti bantuan terhadap kegiatan sipil, *good offices* dan lain-lain) sampai dengan yang sulit (seperti melakukan negosiasi, pengawasan gencatan senjata, kontrol senjata, demobilisasi dan reintegrasi, bantuan/pengembalian pengungsi, perlindungan terhadap bantuan kemanusiaan, melindungi korban sipil, menjaga kondisi agar tetap aman, menciptakan kondisi yang aman dan kontrol senjata secara paksa, dan lain-lain), sesuai dengan penjelasan diatas, melalui peran UNOMSIL dan UNAMSIL.

---

<sup>28</sup> Boer Mauna, *Op.Cit.*, hal 580.

<sup>29</sup> William D.Jurch, UN Peace Operations and the "Brahimi's Report" (October 2001 Revision), pada <http://www.stimson.org/fopo?SN=FP20050613843>, diakses pada 10 Februari 2008, pk.19.32.

### B.2.1. Peran UNOMSIL

Keterlibatan operasi perdamaian PBB di Sierra Leone diawali ketika pada Februari 1998, ECOMOG melakukan serangan, sebagai respon terhadap serangan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak, yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan Junta dan pada 10 Maret 1998, Presiden Kabbah dikembalikan dalam pemerintahan Sierra Leone. PBB kemudian memberlakukan embargo minyak, persenjataan dan travel terhadap Sierra Leone<sup>30</sup>, dan memperkuat kantor dari utusan khususnya untuk disertai dengan adanya pejabat PBB khusus untuk hubungan militer dan staff penasehat keamanan.

Pada tanggal 13 Juli 1998, PBB membentuk *United Nations Observer Mission In Sierra Leone* (UNOMSIL) untuk periode awal selama 6 bulan. Sekjen PBB kemudian menetapkan Duta Istimewa PBB dari Uganda, Mr. Francis G. Okelo, sebagai Utusan Khusus dan juga sebagai pimpinan dari misi tersebut, beserta Brigadir Jendral Subhash C. Joshi dari India sebagai Kepala dari UNOMSIL.<sup>31</sup>

Kekuatan UNOMSIL pada saat itu, terdiri dari: 70 pengamat militer, 15 personil medis dan 5 penasehat polisi lokal. Selain itu, UNOMSIL juga mendapat bantuan dari 50 personel sipil dari internasional dan merekrut 40 staf lokal.

Pada November 1998, UNOMSIL kemudian melakukan *maximum preventive deployment* (penempatan preventif/penempatan para pengawas perdamaian di lapangan maksimum) yang terdiri dari: 41 pengamat militer, 15 personel medis dan 3 penasehat polisi lokal serta juga didukung oleh sekitar 30 personel internasional dan 25 staff lokal.

Sesuai dengan mandat dari DK PBB pada resolusi 1181, UNOMSIL mempunyai tugas-tugas berdasarkan masing-masing elemennya.

Elemen militer UNOMSIL bertugas untuk:<sup>32</sup>

1. Mengawasi keadaan militer dan keamanan pada negara secara keseluruhan, pada situasi dan kondisi keamanan yang memungkinkan,

---

<sup>30</sup> J.A. Ndumbe, 2001, "Diamonds, Ethnicity, and Power: The Case of Sierra Leone.", *Mediterranean Quarterly*, 12(4), hal 90-104.

<sup>31</sup> UNOMSIL – Background dalam <http://www.un.org/depts/DPKO/Missions/unomsil/UnomsilB.htm>, diakses pada 15 Maret 2008 pk.22.10.

<sup>32</sup> *Ibid.*

dan untuk menyediakan utusan khusus dari Sekjen dengan informasi yang ada dengan tujuan untuk menentukan masuknya pengawas militer yang berikutnya ke lokasi ketika kondisi cukup terjamin.

2. Mengawasi pelucutan senjata dan pembubaran pasukan yang sebelumnya ada, dengan konsentrasi untuk mengamankan lokasi, yang meliputi adanya pengawasan terhadap peran *Military Observer Group* (ECOMOG) dari *Economic Community of West African States* (ECOWAS) pada ketetapan dari jaminan sekuritas di kawasan pengamanan itu;
3. Memberikan bantuan dalam memonitor lokasi pelucutan senjata dan lokasi pembubaran pasukan ketika situasi dan kondisi keamanan memungkinkan, berkaitan dengan hukum kemanusiaan internasional.
4. Mengawasi pelucutan senjata yang dilakukan secara sukarela dan pembubaran pasukan dari anggota *Civil Defence Forces* (CDF), sesuai dengan situasi dan kondisi keamanan yang memungkinkan.

Elemen sipil UNOMSIL sendiri bertugas untuk.<sup>33</sup>

1. Memberikan saran, yang dikoordinasikan dengan upaya dari komunitas internasional lainnya, pemerintah dari Sierra Leone dan pejabat polisi setempat, dalam hal pelatihan dan simulasi bagi polisi, penyediaan alat-alat perlengkapan dan rekrutmen pegawai, khususnya pada kebutuhan untuk menghormati dan menerima standar-standar internasional dalam menjaga ketertiban pada masyarakat demokratis, untuk menganjurkan adanya perencanaan pada reformasi dan restrukturisasi dalam kepolisian Sierra Leone, dan untuk mengawasi kemajuan pada hal tersebut.
2. Membantu pemerintah Sierra Leone dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM di Sierra Leone, demi tercapainya standar HAM di negara tersebut.

Pasukan UNOMSIL yang tidak bersenjata, dibantu dan dibawah perlindungan dari ECOMOG, kemudian melakukan dokumentasi atas kejahatan dan pelanggaran terhadap HAM penduduk sipil oleh kelompok pemberontak.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

Pada tanggal 6 Januari 1999, RUF menyerang Freetown dengan melakukan aksi kekerasan secara sistematis dan terorganisir seperti pembunuhan, pemerkosaan dan amputasi terhadap masyarakat sipil, dan juga melakukan pembakaran serta pengrusakan kota Freetown. dan memperoleh kekuasaan di ibukota negara tersebut selama enam minggu. Hal ini menyebabkan ditariknya pasukan UNOMSIL dari Freetown dan dievakuasikan ke kota Conakry dan menyebabkan berkurangnya kekuatan dari UNOMSIL baik dari elemen militernya maupun elemen sipilnya.<sup>34</sup>

Namun demikian, Utusan Khusus PBB dan Kepala dari UNOMSIL tetap melanjutkan tugas mereka, melalui hubungan dekatnya dengan pihak-pihak yang terkait dengan konflik tersebut, dengan cara tetap melakukan dan mempertahankan kontak dengan semua pihak dan tetap memonitor keadaan di lapangan melalui kontak-kontak mereka tersebut. Kemudian pada waktu yang hampir bersamaan, Pasukan ECOMOG kembali merebut ibukota Freetown dan mengembalikan pemerintahan sebelumnya, walaupun ribuan pemberontak dilaporkan masih menyembunyikan diri pada daerah tersebut. Perang tersebut telah mengakibatkan 700.000 orang yang terlantar di dalam negara mereka sendiri dan sekitar 45.000 orang mengungsi ke negara-negara tetangga.

- **Perjanjian Perdamaian Lome / *Lome Peace Agreement***

Sebagai respon dari akibat gempuran RUF pada tanggal 6 Januari 1999, kemudian Utusan Khusus Okelo, melalui konsultasinya dengan negara-negara Afrika Barat, berinisiatif untuk mengadakan suatu rangkaian upaya diplomatik dengan melakukan dialog secara terbuka dengan kelompok pemberontak. Negosiasi kemudian dimulai sejak Mei 1999 dan pada tanggal 7 Juli 1999, seluruh pihak yang terkait dalam konflik sepakat untuk menandatangani suatu perjanjian di Lome, yang kemudian dikenal dengan nama *Lome Peace Agreement*, dengan kesepakatan antara lain, untuk menghentikan aksi kekerasan dan penculikan, serta untuk membentuk pemerintahan nasional di negara tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> UNOMSIL, *Lome Peace Agreement*, <http://www.un.org/depts/DPKO/Missions/unomsil/UnomsilB.htm#LOME>, diakses pada

Salah satu hasil dari perjanjian ini adalah diberikannya pengampunan (amnesti) kepada seluruh *combatants* dan hal ini mendapatkan kecaman dari organisasi-organisasi HAM.<sup>36</sup> PBB kemudian juga menambahkan ketentuan lebih lanjut terhadap hasil perjanjian tersebut, bahwa amnesty tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap pelaku kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap HAM.<sup>37</sup> Selain itu dalam Lome Peace Agreement, juga terdapat beberapa klausul, termasuk adanya banyak permintaan untuk keterlibatan internasional, khususnya PBB, dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan yang terkait dengan hal tersebut dan diperlukannya suatu peningkatan substansi pada peran dari UNOMSIL dan juga peningkatan sumber daya manusia di dalamnya, untuk mengawasi pengimplementasian perjanjian tersebut.

Berdasarkan laporan kepada DK PBB pada 30 Juli 1999, Sekjen PBB kemudian menekankan pada pentingnya momentum perdamaian tersebut, dan sebagai langkah awal, Sekjen merekomendasikan adanya landasan untuk perluasan peran UNOMSIL tersebut. Pada tanggal 20 Agustus 1999, DK PBB mengeluarkan resolusi no.1260 (1999), yang menyetujui diperluasnya peran substansi politis, urusan sipil, informasi, perlindungan hak azasi dan anak dari misi tersebut dan diperbanyaknya jumlah personil UNOMSIL menjadi 210 pengamat militer, 35 personel medis dan dukungan dari 107 personel internasional serta merekrut 69 staf lokal, yang juga disertai dengan perlengkapan-perengkapannya, seperti perlengkapan administratif dan juga bantuan perlengkapan kesehatan. Sementara itu, negara-negara yang memiliki kontribusi dalam pengikutsertaan dalam pasukan UNOMSIL, antara lain adalah: Bangladesh, Bolivia, China, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, France, Gambia, India, Indonesia, Jordan, Kenya, Kyrgyzstan, Malaysia, Namibia, Nepal, New Zealand, Norway, Pakistan, Russian Federation, Slovak Republic, Sweden, Thailand, United Kingdom, United Republic of Tanzania, Uruguay dan Zambia.<sup>38</sup>

---

15 Maret 2008 pk.22.10

<sup>36</sup> Guus Meijer, "Reconstructing Peace in Sierra Leone: Some Civil Society Initiatives", Center for Development Research (ZEF Bonn): *Facing Ethnic Conflicts*, 14-16 December 2000, diakses dari [http://www.zef.de/download/ethnic\\_conflict/meijer.pdf](http://www.zef.de/download/ethnic_conflict/meijer.pdf), pada 27 Maret 2008, pk.22.15.

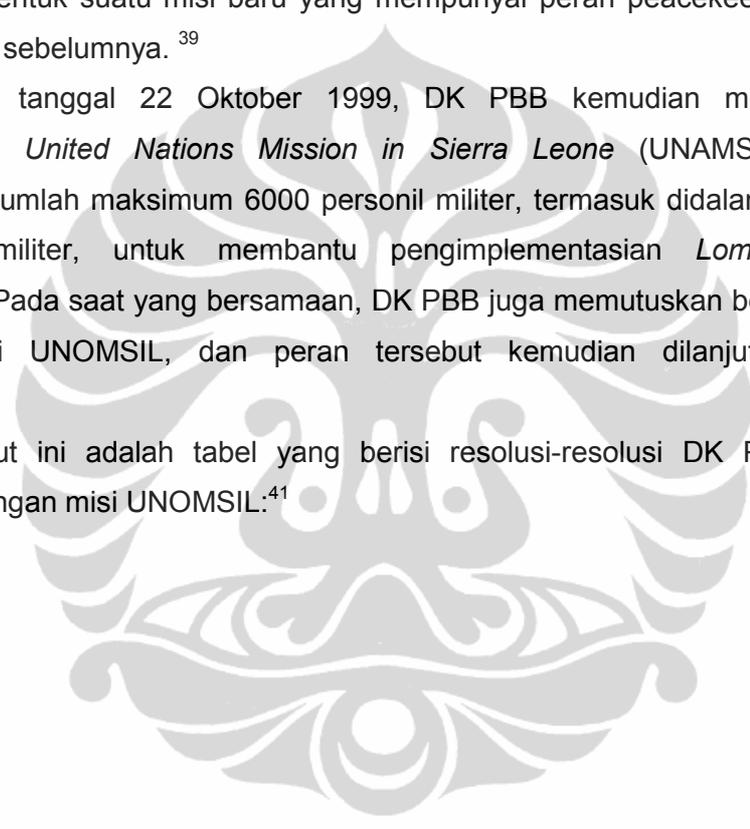
<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Sierra Leone : UNOMSIL – Fact and Figures, pada <http://www.un.org/depts/DPKO/Missions/unomsil/UnomsilF.html>, diakses pada 15 Maret 2008, pk.21.40.

Selama menjalankan mandatnya, UNOMSIL dapat dikatakan memiliki peran yang cukup penting dalam konflik di Sierra Leone, dimana UNOMSIL antara lain telah membantu dalam hal pengawasan gencatan senjata dan juga membantu mengajak para pihak yang bertikai untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut melalui meja perundingan. Namun demikian, pada tanggal 23 September 1999, Sekjen PBB kemudian merekomendasikan kepada DK PBB, untuk membentuk suatu misi baru yang mempunyai peran peacekeeping lebih luas lagi dari sebelumnya.<sup>39</sup>

Pada tanggal 22 Oktober 1999, DK PBB kemudian meresmikan terbentuknya *United Nations Mission in Sierra Leone* (UNAMSIL), yang mempunyai jumlah maksimum 6000 personil militer, termasuk didalamnya, 260 pengamat militer, untuk membantu pengimplementasian *Lome Peace Agreement*. Pada saat yang bersamaan, DK PBB juga memutuskan berakhirnya mandat dari UNOMSIL, dan peran tersebut kemudian dilanjutkan oleh UNAMSIL.<sup>40</sup>

Berikut ini adalah tabel yang berisi resolusi-resolusi DK PBB yang berkaitan dengan misi UNOMSIL:<sup>41</sup>



**Tabel. 3.1.**  
**Resolusi DK PBB mengenai UNOMSIL**

---

<sup>39</sup> UNOMSIL – Background, *Loc. Cit.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> UNOMSIL – Resolutions, dalam <http://www.un.org/depts/DPKO/Missions/unomsil/UnomsilRS.htm>, diakses pada 15 Maret 2008, pk.21.50.

<b>Resolusi Dewan Keamanan PBB</b>	
<b>S / RES / 1270 (1999) 22 Oktober 1999</b>	Pemutusan Mandat dari UNOMSIL dan misi dilanjutkan dengan dibentuknya UNAMSIL.
<b>S / RES / 1260 (1999) 20 Agustus 1999</b>	Menyambut penandatanganan Perjanjian Perdamaian Lome (Lome Peace Agreement) dan menyetujui perluasan substansi dari UNOMSIL.
<b>S / RES / 1245 (1999) 11 Juni 1999</b>	Memperpanjang mandat dari UNOMSIL sampai 13 Desember 1999.
<b>S / RES / 1231 (1999) 11 Maret 1999</b>	Memperpanjang mandat dari UNOMSIL sampai 13 Juni 1999 dan menyambut niat baik Sekjen PBB untuk meresmikan kembali UNOMSIL di Freetown secepat mungkin.
<b>S / RES / 1220 (1999) 12 Januari 1999</b>	Memperpanjang mandat dari UNOMSIL sampai 13 Maret 1999 dan menyimpan usulan Sekjen PBB untuk mengurangi jumlah pengamat militer dari UNOMSIL.
<b>S / RES / 1181 (1998)</b>	Membentuk UNOMSIL untuk satu periode awal dari enam bulan

<b>13 Juli 1998</b>	hingga 13 Januari 1999 dan memberikan mandat bagi misi tersebut.
---------------------	--

Resolusi-resolusi ini menunjukkan bahwa dalam menangani kasus konflik internal di Sierra Leone, PBB tidak hanya pada tahap diplomasi dan perundingan saja, namun PBB juga mengirimkan pasukan perdamaian UNOMSIL untuk meredakan ketegangan konflik yang dilakukan RUF. Dalam melakukan misinya, UNOMSIL mengalami tiga kali perpanjangan mandat hingga akhirnya pada tanggal 22 Oktober 1999 mandat UNOMSIL diputus yang kemudian dilanjutkan oleh misi pasukan perdamaian PBB yang baru yaitu UNAMSIL.

### **B.2.2. Peran UNAMSIL**

Sesuai dengan resolusi DK PBB 1270 (1999) pada tanggal 22 Oktober 1999, PBB membentuk misi pasukan perdamaian yang baru, UNAMSIL (*United Nations Mission in Sierra Leone*), sebagai kelanjutan dari misi sebelumnya (UNOMSIL). Oluyemi Adeniji dari Nigeria, ditunjuk sebagai Utusan Khusus dari Sekjen dan juga sebagai kepala dari misi UNAMSIL. Sebagai komandan dan kepala dari pasukan pengamat militer, ditunjuk Vijay Kumar Jetley dari India, serta sebagai kepala pasukan kepolisian ditunjuk Joseph Dankwa dari Ghana.<sup>42</sup> Markas UNAMSIL itu sendiri berada di kota Freetown.

### **Gambar 3.2. Markas UNAMSIL**

<sup>42</sup> UNAMSIL – Background, dalam <http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unamsil/background.html>, diakses pada 15 Maret 2008, pk.21.15.



Sumber: [http://www.accord.org.za/ct/2005-4/ct4\\_2005\\_pgs40\\_41.pdf](http://www.accord.org.za/ct/2005-4/ct4_2005_pgs40_41.pdf), diakses pada 15 Maret 2008, pk 16.30.

UNAMSIL mempunyai mandat untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut:<sup>43</sup>

- Bekerjasama dengan Pemerintah Sierra Leone dan juga pihak-pihak lain yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian dalam hal implementasi/pelaksanaan Perjanjian Perdamaian tersebut.
- Membantu Pemerintah Sierra Leone pada implementasi dari pelucutan senjata, demobilisasi / pembubaran pasukan dan rencana reintegrasi.
- Memastikan jaminan keamanan / sekuritas dan kebebasan untuk melakukan operasi bagi para personel PBB.
- Mengamati dan mengawasi pihak-pihak yang terkait pada kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata sesuai dengan

<sup>43</sup> UNAMSIL – Mandate, dalam <http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unamsil/mandate.html>, diakses pada 15 Maret 2008, pk.21.35.

perjanjian gencatan senjata yang dilakukan pada tanggal 18 Mei 1999.

- Memberikan semangat kepada pihak-pihak yang terkait agar dapat membangun suatu mekanisme rasa saling percaya satu sama lain untuk menciptakan mekanisme bangunan kepercayaan dan untuk mendukung perencanaan mereka tersebut.
- Memudahkan dan memberikan fasilitasi dalam hal pemberian bantuan kemanusiaan.
- Memberikan dukungan terhadap operasi-operasi yang dilakukan oleh pejabat sipil PBB, termasuk Utusan Khusus dari Sekjen PBB dan juga stafnya, serta para personil HAM dan personil urusan sipil dari PBB.
- Menyediakan bantuan dan dukungan, dalam rangka mengadakan pemilu sesuai dengan konstitusi yang akan berlaku di Sierra Leone.

Sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan 1289 (2000) dari 7 Februari 2000, amanat UNAMSIL kemudian direvisi dengan maksud untuk melibatkan tugas-tugas sebagai berikut (dilakukan berdasarkan pada Bab VII Piagam PBB):

44

- Menyediakan jaminan sekuritas / keamanan pada lokasi kunci dan bangunan-bangunan Pemerintah, khususnya di Freetown, titik potong yang penting dan juga pada bandara udara utama, meliputi bandara udara Lungi.
- Memfasilitasi masyarakat setempat, dengan menyediakan barang-barang kebutuhan dan bantuan kemanusiaan di sepanjang jalan raya – jalan raya yang sudah ditentukan.
- Menyediakan jaminan sekuritas / keamanan pada semua lokasi pelucutan senjata, demobilisasi / pembubaran pasukan dan program reintegrasi.
- Membantu dan mengkoordinasikan dengan para pejabat penegak hukum di Sierra Leone dalam hal pelepasan kewajiban-kewajibannya.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

- Menjaga dan mengamankan persenjataan, amunisi dan perlengkapan-perengkapan militer lainnya yang dikumpulkan dari para mantan pemberontak (ex-combatants) dimana nantinya akan dijual atau bahkan dihancurkan.

Pada dasarnya UNAMSIL memiliki mandat yang tidak jauh berbeda dengan UNOMSIL, karena UNAMSIL hanya meneruskan mandat dari UNOMSIL. Namun demikian DK PBB juga memberikan mandat kepada UNAMSIL untuk melakukan tindakan yang dianggap penting dalam rangka memenuhi tugas tambahan tersebut, dan menyatakan bahwa UNAMSIL, terlepas dari mandat sebelumnya, diizinkan untuk mengambil tindakan yang memang dianggap penting dalam menjamin situasi keamanan dan kebebasan dari personil-personilnya untuk beroperasi serta untuk mampu mengusahakan dan memberikan perlindungan kepada warga sipil dari adanya ancaman kekerasan perang dan fisik, serta membawa mereka agar hal tersebut menjadi tanggung jawab bagi Pemerintah Sierra Leone.<sup>45</sup> Hal ini dilakukan mengingat situasi keamanan Sierra Leone yang masih bersifat rawan konflik.

Sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan nomor 1346 (2001) pada tanggal 30 Maret 2001:

*"The Security Council ... Welcomes the revised concept of operations for UNAMSIL as set out in paragraphs 57 to 67 of the report of the Secretary-General [S/201/228 of 14 March 2001] and the progress already made towards its implementation, and encourages the Secretary-General to proceed to its completion; ..."*<sup>46</sup>

→ "Dewan Keamanan... menyambut baik revisi/perbaikan konsep operasi perdamaian untuk UNAMSIL seperti yang tercantum dalam paragraf 57 sampai 67 pada laporan dari Sekjen [S / 201 / 228 14 Maret 2001] dan dalam pengimplementasiannya sudah terdapat kemajuan dan menganjurkan Sekjen untuk memproses kelengkapannya ; ... "

Pada resolusi ini terdapat persetujuan DK PBB terhadap adanya revisi konsep operasi UNAMSIL yang baru, seperti yang disebutkan dalam paragraf 57

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

sampai 67, demi terwujudnya pengimplementasian perjanjian tersebut dan meghimbau Sekjen PBB untuk melakukan proses penyelesaiannya.

Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa dalam paragraf 57 sampai 67 merupakan penekanan pada revisi konsep operasi UNAMSIL, salah satu paragrafnya yaitu paragraf 58 dari resolusi tersebut berisi sebagai berikut:

*"The main objectives of UNAMSIL in Sierra Leone remain to assist the efforts of the Government of Sierra Leone to extend its authority, restore law and order and stabilize the situation progressively throughout the entire country, and to assist in the promotion of a political process which should lead to a renewed disarmament, demobilization and reintegration programme and the holding, in due course, of free and fair elections."<sup>47</sup>*

→ "Misi utama dari UNAMSIL di Sierra Leone adalah untuk membantu upaya-upaya dari Pemerintah Sierra Leone dalam memperluas otoritasnya, menegakkan kembali hukum dan peraturan yang ada dan mestabilkan keadaan negara secara menyeluruh, serta untuk membantu mempromosikan suatu proses politik yang kemudian dilanjutkan dengan adanya perlucutan senjata diperbaharui, pembubaran pasukan, integrasi ulang dan pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil."

Kekuatan UNAMSIL pada saat itu terdapat sekitar 17.500 personil militer, yang didalamnya juga termasuk 260 pengamat militer (S/RES/1346) dan juga 170 personil polisi. (S/RES/1436).<sup>48</sup> Negara-negara yang berkontribusi dalam menyumbangkan personel untuk pasukan militer bagi UNAMSIL, antara lain adalah: Bangladesh, Bolivia, China, Croatia, Egypt, Gambia, Germany, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Jordan, Kenya, Kyrgyzstan, Malawi, Malaysia, Nepal, Nigeria, Norway, Pakistan, Russian Federation, Slovakia, Sweden, Tanzania, Ukraine, United Kingdom, Uruguay dan Zambia. Sedangkan, negara-negara yang menyumbangkan personel untuk pasukan kepolisian bagi UNAMSIL, antara lain adalah: Australia, Bangladesh, Cameroon, Canada, Gambia, Ghana, India, Jordan, Kenya, Malawi, Malaysia, Mauritius, Namibia, Nepal, Niger,

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Sierra Leone : UNAMSIL – Fact and Figures, pada <http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unamsil/facts.html>, diakses pada 15 Maret 2008, pk.21.45.

Nigeria, Norway, Pakistan, Russia, Senegal, Sri Lanka, Sweden, Tanzania, Turkey, United Kingdom, United States, Zambia dan Zimbabwe.<sup>49</sup>

UNAMSIL dapat dikatakan sebagai salah satu model perdamaian yang sukses seperti halnya dengan tipe-tipe dari peacekeeping PBB yang selama ini mendapat perhatian. Sesuai dengan mandatnya, misi tersebut berperan dalam hal melucuti beribu-ribu mantan pemberontak, dengan bekerjasama dengan pasukan organisasi regional, ECOMOG.<sup>50</sup> Sejak lahirnya PBB, tujuan untuk mencapai pelucutan senjata dan pembatasan senjata multilateral telah menjadi titik pusat dari upaya organisasi tersebut untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. PBB telah memberikan prioritas tertinggi bagi pengurangan dan akhirnya penghapusan senjata-senjata nuklir, menghancurkan senjata kimia dan memperkuat larangan terhadap senjata biologis. Hal ini terlihat pada piagam PBB, pasal 11, yang berisi "prinsip-prinsip umum kerjasama dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional, termasuk prinsip-prinsip pengelolaan pelucutan senjata, serta pengaturan persenjataan".<sup>51</sup>

Dibentuknya UNAMSIL, terutama dengan tujuan untuk membantu pihak-pihak yang terkait dengan *Lome Peace Agreement* untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut dan membantu dalam melakukan pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi (*Disarmament, Demobilization and Reintegration / DDR*). Program DDR di Sierra Leone ini akan diadakan dalam tiga tahap. Tahap pertama berlangsung dari bulan September hingga Desember 1998. Tahap kedua dari bulan Juli 1999 hingga Mei 2000. Tahap ketiga dari bulan Mei 2001 hingga Mei 2002.<sup>52</sup>

Hingga pada akhir tahap kedua, yaitu pada bulan Mei 2000, UNAMSIL telah berhasil mengumpulkan 12.695 senjata dan 253.535 amunisi. Namun demikian, besarnya jumlah pelucutan senjata yang dilakukan UNAMSIL tersebut, ternyata tidak dihancurkan, karena Presiden Kabbah berdalih akan menggunakan senjata itu sebagai perlengkapan militer dan polisi Sierra Leone (SLA dan SLP).

### Tabel. 3.2

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> UNAMSIL – Background, *Loc. Cit.*

<sup>51</sup> \_\_\_\_\_, *Basic Facts about United Nations, Op. Cit.*, hal.121.

<sup>52</sup> "DDR in Sierra Leone, UN", pada <http://www.unddr.org/countryprogrammes.php?c=60>, diakses pada 16 Maret 2008, pk 01.32.

**Pelucutan Senjata di Sierra Leone  
Berdasarkan pada Lome Peace Agreement**

<b>Jenis Senjata</b>	<b>Jumlah pelucutan senjata sampai tanggal 9 Mei 2000</b>
AK-47 Rifle	4.287
AK-74 Rifle	1.072
FN FAL Rifle	440
SLR Rifle	451
G-3 Rifle	940
Machine Gun	140
RPG-7	217
Mortar	45
Pistol	496
Grenade	1.855
"Others"	2.752
<b>Total</b>	<b>12.695</b>
Amunisi	253.535

*Sumber:* Eric G.Berman, *Re-Armament in Sierra Leone: One Year After the Lomé Peace Agreement*, pada <http://www.reliefweb.int/library/documents/2001/sas-sie-dec00.pdf>, diakses pada 16 Maret 2008, pk.01.40.

Pada tanggal 7 Februari 2000, setelah ada pengumuman mengenai akan ditariknya pasukan ECOMOG, DK PBB kemudian mengeluarkan resolusi 1289

yang berisi bahwa akan ditingkatkannya kekuatan UNAMSIL dari 9.000 menjadi 11.000 pasukan. Kemudian pada bulan Mei 2000, misi ini hampir saja gagal ketika para pemberontak RUF menculik sekitar 100 orang staf UNAMSIL dan membunuh 4 staff UNAMSIL. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak tersebut membuat komunitas internasional melakukan penekanan kepada kelompok pemberontak untuk mematuhi gencatan senjata dan menjatuhkan sanksi untuk melawan sponsor-sponsor dari kelompok RUF.

DK PBB kemudian memerintahkan UNAMSIL untuk bertindak tegas serta menyerang kelompok RUF. DK PBB kemudian meningkatkan kekuatan UNAMSIL lagi pada tanggal 19 Mei 2000, dari 11.000 menjadi 13.000 pasukan untuk membantu memulihkan perdamaian di negeri itu. Pada bulan Juli 2000, UNAMSIL kemudian melakukan operasi penyelamatan untuk membebaskan tawanan-tawanan yang masih disandera kelompok pemberontak RUF. Pertempuran yang dilakukan UNAMSIL tersebut dapat dianggap berhasil, karena mereka berhasil menangkap pemimpin kelompok pemberontak RUF Foday Sankoh, yang kemudian diserahkan kepada aparat kepolisian. Selain itu UNAMSIL juga berhasil membebaskan sekitar separuh dari sandera yang ditangkap oleh RUF.

Dalam hal ini tindakan pasukan perdamaian UNAMSIL dapat didasarkan pada mandat yang diberikan oleh DK PBB, berdasarkan Bab VII Piagam PBB yang salah satunya berisi: “melalui Bab VII, pasukan operasi perdamaian diberi mandat untuk menggunakan *use of force in self defense* dan menjamin keamanan dan kebebasan bagi mobilisasi pasukan”. Hal ini menunjukkan bahwa Bab VII menjadi penegasan bagi pasukan operasi perdamaian UNAMSIL untuk menggunakan *use of force* sebagai alat membela diri, untuk memastikan keamanan dan kebebasan bergerak para personilnya, dan untuk dapat melindungi warga sipil yang berada dalam ancaman kekerasan fisik, sesuai dengan kapabilitas yang dimiliki dan wilayah di mana pasukan ditempatkan.<sup>53</sup>

Setelah itu UNAMSIL kemudian mengusahakan suatu upaya mediasi yang baru untuk membawa kelompok pemberontak RUF dan Liberia untuk bernegosiasi. Hal tersebut membawa jumlah pasukan yang lebih banyak untuk mengamati dan mengawasi gencatan senjata dan mulai melakukan pelucutan

---

<sup>53</sup> Resolusi DK PBB 1270 (1999), paragraph 14.

senjata terhadap para pasukan dari pihak-pihak yang terkait.<sup>54</sup> Tanggal 11 Oktober 2001, UNAMSIL mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Sierra Leone dan kelompok RUF untuk mendiskusikan pelucutan senjata. Tanggal 22 Oktober 2001, UNAMSIL melakukan pelucutan senjata di sebelah utara distrik Koinadugu dan di sebelah selatan distrik Moyamba. Tanggal 31 Oktober 2001, UNAMSIL melakukan pelucutan senjata di sebelah selatan distrik Bo dan di sebelah utara distrik Bombali. Hal itu kemudian dilanjutkan lagi pada bulan November 2001, ketika UNAMSIL melakukan pelucutan senjata di distrik Tokolili, distrik Pojehun, distrik Kenema dan distrik Kailahun.<sup>55</sup>

Setelah itu pada tanggal 31 Desember 2001, UNAMSIL dengan dibantu oleh *Community Arms Collection and Destruction* (CICAD) dan *Sierra Leone Police* (SLP), melakukan program pelucutan senjata di Sierra Leone. Keterlibatan dari CICAD ini menunjukkan bahwa selain dengan organisasi regional, PBB juga membutuhkan LSM-LSM untuk mengatasi proliferasi senjata kecil dan ringan di Sierra Leone. Keterlibatan SLP dalam hal ini juga memainkan peran penting dalam operasi perdamaian PBB. Ketika operasi perdamaian dikerahkan dalam sebuah konflik internal, komponen militer akan berusaha untuk menjaga kondisi yang aman dan stabil yang didukung oleh polisi lokal/setempat. Setelah kondisi yang relatif stabil tercipta, maka aturan hukum menjadi dasar bagi upaya untuk membangun keteraturan sipil dan pembangunan institusi sipil.<sup>56</sup>

Selain pelucutan senjata, UNAMSIL juga telah membantu mengadakan pemilihan nasional, membantu membangun kembali kekuatan polisi lokal negara tersebut dan berkontribusi dalam merehabilitasi infrastruktur dan memberikan rakyat setempat bantuan-bantuan dari pemerintah. PBB juga membantu pemerintah untuk menghentikan perdagangan ilegal dan mengatur industri perdagangan tersebut. Selama masa peperangan tersebut, kelompok pemberontak telah mengambil dan menggunakan keuntungan (uang) dari berlian tersebut untuk membeli persenjataan yang akan digunakan dalam konflik.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> John McFarlane dan William Maley, "Civilian Police in UN Peace Operations: Some Lessons from Recent Australian Experience", dalam Ramesh Thakur dan Albrecht Schnabel, *Op.Cit.*, hal. 186.

UNAMSIL juga telah mengawasi dan melatih penduduk Sierra Leone dalam hal-hal yang berkaitan dengan HAM dan menyediakan instrumen-instrumen untuk merancang Pengadilan Khusus terhadap Sierra Leone untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam melakukan kejahatan perang. Pada bulan Agustus 2000, atas permintaan Presiden Kabbah, DK PBB memutuskan untuk membentuk Pengadilan Khusus bagi Sierra Leone, untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggungjawab atas berbagai pelanggaran serius terhadap HAM; seperti yang telah disepakati dalam penandatanganan *Abidjan Peace Agreement* pada tanggal 30 November 2000. Anggota-anggota pihak yang bertikai melalui mekanisme ini juga diharapkan untuk berpartisipasi dalam rencana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (*Truth and Reconciliation Commission / TRC*).<sup>57</sup>

Pelanggaran HAM yang telah terjadi selama perang di Sierra Leone dalam hal ini berusaha diselesaikan oleh pemerintahan Kabbah melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC) serta Pengadilan khusus bagi pelanggar berat HAM. Namun demikian, pada kenyataannya upaya ini tidak berhasil menyentuh pelaku-pelaku pelanggaran berat terhadap HAM, dimana hal ini kemudian mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional. Usaha tersebut dianggap kurang berhasil dalam menuntaskan aksi kekerasan di Sierra Leone selama perang internal. Selain itu pemerintah Kabbah juga dianggap mengingkari komitmen terhadap pengusutan pelanggaran HAM. Hal ini terjadi karena Foday Sankoh, pelaku utama pelanggaran berat HAM dalam perang internal tersebut, diberikan jabatan sebagai ketua *Commission for the Management of Strategic Resources, National Reconstruction, and Development* sebagai konsesi dari *Lome Peace Agreement*.<sup>58</sup>

Pada tahun yang sama, DKK PBB juga memberlakukan sanksi terhadap konflik perdagangan berlian, melarang impor terhadap komoditas berlian dari Sierra Leone, yang diberlakukan terhadap negara-negara anggota PBB selama 18 bulan; kecuali berlian-berlian yang memiliki sertifikat yang baru ditetapkan oleh pemerintahan Sierra Leone. AS, Inggris, Belgia, dan Israel turut membantu Sierra Leone dalam mengembangkan kebijakan perdagangan berlian yang baru

---

<sup>57</sup> "Sierra Leonean Truth and Reconciliation Commission", pada <http://sierra-leone.org/trc-20questions.html>, diakses pada 27 Maret 2008, pk. 01.34.

<sup>58</sup> John L.Hirsch, *Op.Cit.*, hal.82.

agar persediaan berlian di negara tersebut dapat menciptakan kesejahteraan bagi penduduknya; bukannya malah menyebabkan tindak kekerasan.<sup>59</sup>

Pada awal thn 2002 UNAMSIL telah melakukan pelucutan senjata dan demobilisasi terhadap 75.000 mantan pasukan pemberontak, termasuk juga di dalamnya adalah para tentara anak. Setelah keadaan situasi politik negara tersebut stabil, misi ini kemudian membantu untuk mengatur pemilihan umum di Sierra Leone secara adil, dengan cara menyediakan bantuan logistik, bantuan informasi bagi masyarakat.

Dalam mengatur dan mengadakan pemilihan umum di Sierra Leone, PBB bekerjasama dengan komisi pemilihan umum nasional / *National Electoral Commission* (NEC), dengan hasil kembalinya Ahmad Tejan Kabbah menjadi presiden dengan jumlah suara sebanyak 70%.<sup>60</sup> Pada tanggal 18 Januari 2002, Pemerintah Sierra Leone melalui Presiden Ahmad Tejan Kabbah, kemudian mendeklarasikan bahwa perang tersebut secara resmi berakhir.<sup>61</sup> Dua tahun kemudian misi ini juga memberikan bantuan yang sama terhadap pemilihan-pemilihan pemerintahan lokal.

Selain peran-peran yang sudah disebutkan sebelumnya, PBB juga mempunyai peran lain dalam konflik di Sierra Leone, yaitu dalam hal bantuan kemanusiaan. Sejak operasi bantuan kemanusiaannya yang terkoodinir untuk pertama kalinya di Eropa menyusul kehancuran dan terbengkalainya penduduk secara besar-besaran pada Perang Dunia Kedua, PBB menyandarkan diri kepada masyarakat internasional dalam memberikan respons terhadap bencana alam maupun bencana buatan manusia, yang berada diluar batas kemampuan nasional untuk mengatasinya secara sendirian. Kini, organisasi dunia ini merupakan pemberi bantuan darurat dan bantuan jangka panjang terbesar, pendorong bagi tindakan pemerintah dan badan-badan bantuan, serta bertindak sebagai penasehat keamanan bagi dunia internasional atas nama penduduk yang mengalami keadaan darurat.

---

<sup>59</sup> William Reno, et.al., *Op.Cit.*

<sup>60</sup> UNAMSIL – Factsheet 2: Elections dalam [http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unamsil/factsheet2\\_elections.pdf](http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unamsil/factsheet2_elections.pdf), diakses pada 21 Maret 2008 pk 01.25.

<sup>61</sup> SIERRA LEONE – UNAMSIL – Background, dalam <http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unamsil/background.html>, diakses pada 15 Maret 2008, pk.21.15.

Berdasarkan penjelasan diatas, UNAMSIL telah melakukan semua tugas yang diperintahkan oleh DK PBB dimana dalam perannya di lapangan UNAMSIL juga membantu para sukarelawan untuk mengembalikan lebih dari setengah juta para korban perang dan pengungsi internal. Hal tersebut membantu pemerintah Sierra Leone dalam mengembalikan kekuasaannya yang juga didukung dengan diadakannya pemilihan umum pada bulan Januari 2002, layanan sosial di lokasi-lokasi yang dulunya dikendalikan oleh kelompok pemberontak. Selain itu misi ini juga telah melatih sekitar 1000 anggota polisi dan mengkonstruksi / merekonstruksi sejumlah besar kantor polisi.

Misi ini bekerjasama dengan agensi-agensinya dari PBB untuk membentuk suatu proyek yang bertujuan menyediakan lapangan pekerjaan bagi beribu-ribu pengangguran yang terdiri dari remaja, mantan-mantan pasukan pemberontak (*ex-combatants*) dan menyediakan layanan umum bagi masyarakat lokal. Pasukan UNAMSIL juga merekonstruksi sekolah-sekolah dan klinik-klinik, membentuk dan mendanai proyek-proyek pertanian dan mensponsori klinik kesehatan gratis.<sup>62</sup>

Ketika UNAMSIL melakukan hal-hal tersebut, Sierra Leone masih menghadapi banyak tantangan, seperti; adanya kenyataan bahwa negara tersebut masih sangat rawan dan perlu untuk mengambil langkah-langkah kongkrit guna mencari akar permasalahan dari konflik tersebut dan mengusahakan adanya budaya penghormatan terhadap HAM. Perekonomian dari Sierra Leone masih sangat tergantung pada bantuan-bantuan dana. Ketidakseimbangan pendapatan yang didapat dari penambangan berlian masih ditemukan adanya banyak penyelewengan yang dilakukan oleh sektor swasta.<sup>63</sup>

Misi PBB di Sierra Leone (UNAMSIL) adalah yang terbesar dari 15 operasi PBB pada kurun waktu lima tahun terakhir (1997-2002), dengan 16.654 personil militer pada akhir September, termasuk 839 tentara Zambia. Adanya data mengenai kematian enam orang dari pasukan UNAMSIL pada tanggal 8 Januari 2002 menjadikan total 65 orang tewas yang diderita UNAMSIL sejak program ini diadakan pada Oktober 1999, dan 38 tentara Zambia yang tewas dalam tugas PBB. Di antara orang-orang yang tewas di Sierra Leone, 26 orang

---

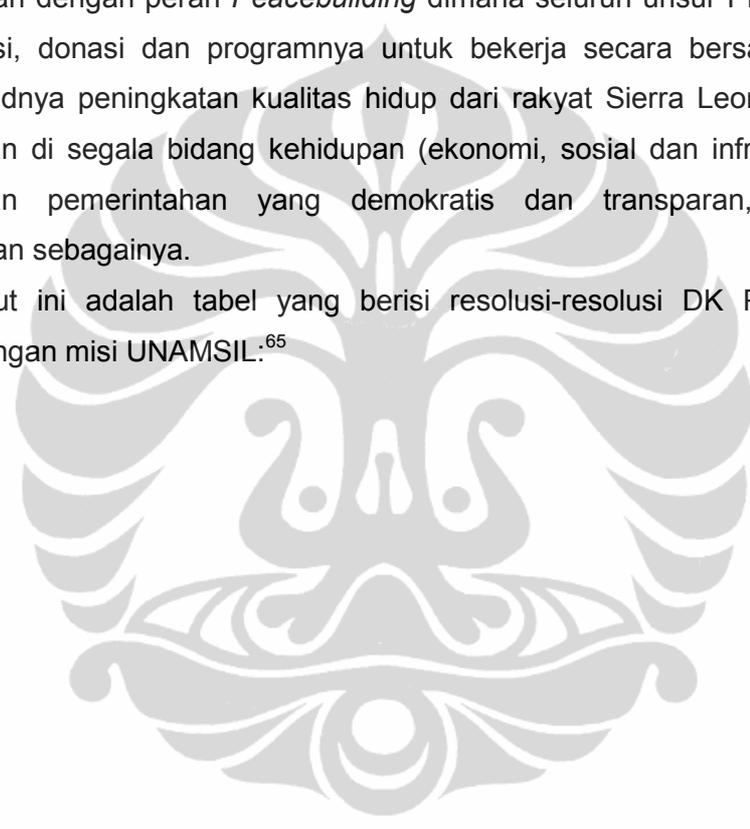
<sup>62</sup> UNAMSIL – Background, *Op.Cit.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

tewas karena kecelakaan, 24 karena sakit, delapan orang karena aksi konflik dan tujuh lainnya karena sebab-sebab lainnya.<sup>64</sup>

Pencapaian PBB dalam hal bantuan penjagaan perdamaian, bantuan kemanusiaan dan proses pemulihan, selama ini dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya UNIOSIL (*United Nations Integrated Office in Sierra Leone*) yang merupakan pusat dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peran *Peacebuilding* dimana seluruh unsur PBB seperti agensi-agensinya, donasi dan programnya untuk bekerja secara bersama-sama demi terwujudnya peningkatan kualitas hidup dari rakyat Sierra Leone melalui pembangunan di segala bidang kehidupan (ekonomi, sosial dan infrastruktur), pembangunan pemerintahan yang demokratis dan transparan, jaminan keamanan dan sebagainya.

Berikut ini adalah tabel yang berisi resolusi-resolusi DK PBB yang berkaitan dengan misi UNAMSIL.<sup>65</sup>



**Tabel 3.3.**

**Resolusi DK PBB mengenai UNAMSIL**

---

<sup>64</sup> <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0201/08/lu07.html>

<sup>65</sup> Sierra Leone : UNAMSIL – Resolutions, pada <http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unamsil/UnamsilRS1.htm>, diakses pada 15 Maret 2008, pk.21.40.

<b>Resolusi Dewan Keamanan PBB</b>	
<b>S / RES / 1620, 31 Agustus 2005</b>	Dewan Keamanan PBB meresmikan terbentuknya UNIOSIL, untuk satu periode awal dari 12 bulan, dimulai pada tanggal 1 Januari 2006, dengan tujuan untuk mencari dan menyelesaikan akar permasalahan dari konflik tersebut serta menjalankan misi <i>peacebuilding</i> .
<b>S / RES / 1610, 30 Juni 2005</b>	Memperpanjang mandat UNAMSIL dengan jangka waktu untuk enam bulan berikutnya, hingga akhir tahun 2005, dengan catatan adanya persetujuan rekomendasi dari Sekjen bahwa pengiriman pasukan mulai dari pertengahan bulan Agustus dan akan berakhir pada 31 Desember.
<b>S / RES / 1562, 17 September 2004</b>	Memperpanjang mandat UNAMSIL sampai 30 Juni 2005
<b>S / RES / 1537, 30 Maret 2004</b>	Memperpanjang mandat UNAMSIL sampai 30 September 2004
<b>S / RES / 1508, 19 September 2003</b>	Memperpanjang mandat UNAMSIL sampai 30 September 2003
<b>S / RES / 1470 , 28 Maret 2003</b>	Memperpanjang mandat UNAMSIL sampai 30 September 2003
<b>S / RES / 1436</b>	

<b>(2002), 24 September 2002</b>	Memperpanjang mandat UNAMSIL sampai 30 Maret 2003
<b>S / RES / 1400 (2002), 28 Maret 2002</b>	Memperpanjang mandat UNAMSIL sampai 30 September 2002.
<b>S / RES / 1389 (2002), 16 Januari 2002</b>	Berhubungan dengan tugas UNAMSIL dalam merancang Pemilu di Sierra Leone.
<b>S / RES / 1370 (2001), 18 September 2001</b>	Memperpanjang mandat UNAMSIL selama 6 bulan, mulai dari 30 September 2001.
<b>S / RES / 1346 (2001), 30 Maret 2001</b>	Memperpanjang mandat UNAMSIL selama 6 bulan , mulai dari 30 Maret 2001 dan meningkatkan kekuatan pasukan militernya menjadi 17.500 personil.
<b>S / RES / 1334 (2000), 22 Desember 2000</b>	Memperpanjang mandat UNAMSIL sampai 30 Maret 2001.
<b>S / RES / 1321 (2000), 20 September 2000</b>	Memperpanjang mandat UNAMSIL sampai 31 Desember 2000.
<b>S / RES / 1317 (2000), 5 September 2000</b>	Memperpanjang mandat UNAMSIL sampai 20 September 2000.

<b>S / RES / 1315</b> <b>(2000),</b> <b>14 Agustus 2000</b>	Meminta Sekjen PBB untuk segera mengadakan negosiasi dalam suatu perjanjian dengan Pemerintah Sierra Leone, untuk membentuk suatu Pengadilan Istimewa yang independen.
<b>S / RES / 1313</b> <b>(2000),</b> <b>4 Agustus 2000</b>	Memperpanjang mandat UNAMSIL sampai 8 September 2000 dan setuju untuk menambah kekuatan serta memperluas peran UNAMSIL.
<b>S / RES / 1299</b> <b>(2000),</b> <b>19 Mei 2000</b>	Memberikan persetujuan untuk meningkatkan kekuatan UNAMSIL
<b>S / RES / 1289</b> <b>(2000),</b> <b>7 Februari 2000</b>	Memberikan persetujuan untuk memperluas peran substansi UNAMSIL.
<b>S / RES / 1270</b> <b>(1999),</b> <b>22 Oktober 1999</b>	Meresmikan terbentuknya <i>United Mission in Sierra Leone</i> (UNAMSIL)

Resolusi-resolusi ini menunjukkan bahwa PBB sangat serius dalam menangani kasus konflik internal di Sierra Leone. Setelah melakukan usaha-usaha diplomasi dan perundingan serta pengiriman pasukan perdamaian UNOMSIL, PBB kemudian melanjutkan dengan mengirim pasukan perdamaianya yang baru yaitu UNAMSIL. Pasukan perdamaian UNAMSIL ini tidak hanya melakukan misi peacekeeping saja, namun juga misi peacebuilding. Hal ini terlihat dari usaha UNAMSIL dalam membantu pemerintah Sierra Leone dalam hal pengadaan Pemilu. Pada tahun 2005, misi UNAMSIL kemudian diteruskan dengan terbentuknya UNIOSIL.

### **C. Pembahasan Peran PBB dalam Mengatasi Konflik Internal Sierra Leone**

Berdasarkan data-data diatas, penulis menyimpulkan bahwa PBB dapat dikatakan cukup efektif dan berhasil dalam menjalankan perannya sebagai organisasi internasional yang bertujuan mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan perannya dalam mengatasi konflik internal di Sierra Leone.

Keterlibatan PBB dalam konflik internal di Sierra Leone dapat dikatakan sebagai salah satu gambaran perkembangan operasi perdamaian pasca perang dingin, dikarenakan tugas misi perdamaian (PKO) PBB mengalami perkembangan menjadi *multidimensional peacekeeping* yang mencakup kegiatan-kegiatan *peacekeeping, peacebuilding dan peace-enforcement*. Hal ini seiring dengan perkembangan banyaknya kecenderungan konflik internal yang menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan yang berkepanjangan, termasuk konflik internal yang terjadi di Sierra Leone.

Salah satu tujuan utama PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) adalah mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Sejak berdiri, PBB sering terlibat atas permintaan pihak (negara) yang terlibat untuk mencegah pertikaian agar tidak meningkat menjadi peperangan. Selama puluhan tahun PBB telah membantu menyelesaikan sejumlah konflik, melalui tindakan Dewan Keamanan (organ utama dalam menanggulangi masalah-masalah perdamaian dan keamanan internasional).

Keberhasilan PBB dalam mengatasi konflik internal di Sierra Leone, selain memang karena adanya pengaruh dan tujuan PBB sebagai organisasi internasional, tentunya juga didukung dengan adanya bantuan-bantuan dari organisasi regional karena; selain memiliki kedekatan wilayah dengan daerah konflik (adanya kesamaan budaya, tradisi, geografi, sejarah, dan sebagainya), organisasi regional juga memiliki kekhawatiran yang besar terhadap situasi yang terjadi, sehingga organisasi regional memiliki pengetahuan dan analisa yang lebih mendalam mengenai akar permasalahan dari konflik dan akan berusaha untuk mencegah penyebaran konflik yang dapat membahayakan keseluruhan kawasan. Organisasi regional yang juga turut membantu dalam penyelesaian konflik internal Sierra Leone, antara lain adalah OAU (*Organization of African Unity*) dan ECOWAS (*Economic Community of West African States*).

Berbagai tindakan telah dilakukan PBB, mulai dari mengimplementasi, memonitor dan menengahi peranan perselisihan yang timbul, membujuk pihak-pihak supaya menggunakan meja konferensi dan bukannya kekuatan persenjataan, atau untuk membantu memulihkan kembali perdamaian ketika konflik meletus. Hal ini sesuai dengan Bab VI Piagam PBB, yang mengatakan bahwa penyelesaian konflik secara damai dilakukan melalui jalan-jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum, atau cara-cara damai lainnya.

Namun demikian langkah-langkah awal yang ditempuh PBB ini mengalami kesulitan. Dalam lingkungan konflik internal adanya aktor-aktor yang terlibat sangat beragam dan tidak jelas (mulai dari tentara nasional, paramiliter, bandit, sampai kelompok-kelompok penguasa wilayah), sehingga mengakibatkan sulitnya memperoleh persetujuan dari semua pihak yang bertikai, khususnya ketika tidak ada otoritas politik yang berwenang dalam negara yang sudah *collapse*/lumpuh. Sementara itu di sisi lain, aktor-aktor yang terlibat memiliki kepentingan sehingga terus melakukan upaya untuk tetap mempertahankan konflik dan terus melakukan pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Akibatnya, tindakan operasi perdamaian yang dilakukan PBB ini mendapatkan kesulitan dalam hal kebebasan bergerak.

Pada dasarnya, tanpa permintaan dari pihak yang terlibat dalam suatu konflik internal, PBB dapat mengirimkan pasukan perdamaianya ke dalam konflik internal tersebut berdasarkan Bab VII Piagam PBB; khususnya dalam Pasal 41 yang memaparkan berbagai tindakan yang dapat diambil Dewan Keamanan berupa tindakan di luar penggunaan kekuatan bersenjata, serta Pasal 42 yang memberikan kekuasaan pada Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan dengan kekuatan bersenjata. Namun untuk kasus konflik internal di Sierra Leone, PBB mendapatkan ijin dari pemerintah Sierra Leone, sehingga keterlibatan PBB dalam konflik internal di negara tersebut pun menjadi semakin kuat.

Dalam kasus di Sierra Leone ini, Dewan Keamanan PBB merupakan kekuatan penting yang memiliki peranan dalam mengkoordinasikan operasi perdamaian. Pentingnya peran Dewan Keamanan dapat terlihat dengan turut sertanya hampir seluruh anggota tetap DK dalam kontribusi di lapangan, melalui

resolusi-resolusinya, yang merupakan tindak lanjut atas situasi dan kondisi di lapangan yang mengkhawatirkan.

Hadirnya pasukan perdamaian PBB (UNOMSIL dan UNAMSIL) di Sierra Leone merupakan salah satu mekanisme untuk memelihara perdamaian internasional. Melalui misi Pengamat (*Observers*) dan Pasukan Pemelihara Perdamaian (*United Nations Peace Keeping Force*), PBB berusaha untuk mencari akar permasalahan dari konflik internal Sierra Leone dan kemudian berusaha untuk menyelesaikannya.

UNOMSIL merupakan misi pasukan perdamaian pertama yang dikirim PBB ke Sierra Leone. Pada awalnya pasukan UNOMSIL dibawah perlindungan dari ECOMOGi, dapat melakukan tugasnya dalam melakukan dokumentasi terhadap aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak RUF, meskipun pada akhirnya dihadang oleh kelompok RUF. Namun hal ini bukan berarti UNOMSIL tidak mempunyai peran dalam menyelesaikan konflik internal di Sierra Leone, karena UNOMSIL mempunyai peran penting dalam melakukan pengawasan gencatan senjata dan UNOMSIL juga membantu para pihak yang bertikai untuk dapat menyelesaikan konflik melalui proses negosiasi / perundingan yang kemudian dikenal dengan nama *Lome Peace Agreement*. Mandat UNOMSIL sejak 1998 hanya bertahan sekitar setahun, karena pada bulan Oktober 1999, mandatnya diputus oleh DK PBB, yang kemudian diteruskan oleh misi pasukan perdamaian UNAMSIL.

Pembentukan misi perdamaian UNAMSIL ini dimaksudkan agar peran pasukan perdamaian PBB dapat berjalan lebih efektif. Hal ini disertai dengan jumlah kekuatan UNAMSIL yang lebih besar daripada UNOMSIL dan adanya mandat dari DK PBB untuk mengambil tindakan yang memang dianggap penting dalam menjamin situasi keamanan dan kebebasan dari para personilnya untuk beroperasi.

Operasi dengan kekuatan militer di Sierra Leone yang didasarkan pada Bab VII Piagam PBB tersebut tidak hanya dilakukan untuk mengatasi konflik bersenjata saja, tetapi telah berkembang kepada tindakan-tindakan kemanusiaan di suatu wilayah, seperti; untuk melindungi penduduk sipil, pengungsi dan *internally displaced persons*, serta perlindungan hak-hak asasi manusia dan juga perlindungan pengiriman bantuan kemanusiaan.

Hal ini juga terlihat pada resolusi PBB nomor 1296 yang memperlihatkan bahwa upaya untuk menargetkan populasi sipil atau pihak-pihak yang dilindungi dan tindakan kekerasan terhadap hukum internasional dalam hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional dalam konflik bersenjata dapat disamakan sebagai ancaman terhadap keamanan dan perdamaian internasional. DK juga menyebutkan kesediaannya untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi hal semacam ini. Hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap warga sipil juga merupakan bagian dari tugas pasukan perdamaian.

Peran penting UNAMSIL dalam penyelesaian konflik internal di Sierra Leone ini dapat terlihat dari tindakan-tindakan yang berkaitan dengan *peacebuilding*. *Peacebuilding* merupakan masa dimana kegiatan ataupun tahapan yang dilakukan berada dalam tujuan untuk memperbaiki insititusi yang ada dalam mendukung keamanan dan perdamaian di wilayah tersebut. Yang termasuk dalam *peacebuilding* adalah pengembalian kombatan sipil dalam *civil society*, peningkatan lembaga hukum dan *law enforcement*, serta mendirikan institusi-institusi yang menunjang keberadaan demokrasi dan perdamaian.

UNAMSIL telah melakukan pelucutan senjata sebagai salah satu bentuk perjanjian Lome Peace Agreement dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Tindakan pelucutan senjata yang dilakukan oleh UNAMSIL dapat dilihat sebagai suatu parameter konflik yang cukup signifikan, mengingat sebelum adanya tindakan pelucutan senjata tersebut, intensitas kekerasan dan perang cukup tinggi. UNAMSIL juga membantu mengembalikan para korban perang dan pengungsi internal, membantu mengadakan pemilihan umum, serta melatih personil polisi dan juga merekonstruksi sejumlah besar kantor polisi.

Keberhasilan operasi perdamaian PBB di Sierra Leone ini, antara lain juga dipengaruhi dari dukungan yang diberikan oleh negara-negara anggota yang menjadi kontributor pasukan. Dalam operasi perdamaian PBB di UNAMSIL, terdapat sekitar 30 negara anggota yang menjadi kontributor, antara lain terdiri dari: Bolivia, China, Croatia, Egypt, Gambia, Germany, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Jordan, Kenya, Kyrgyzstan, Malawi, Nepal, Nigeria, Norway, Sweden, Tanzania, Ukraine, United Kingdom, Zambia, dan masih banyak lagi.